

Stabilitas Semu, Fiskal Rapuh

Brief Update - Juli 2026

Center of Macroeconomics and Finance
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Monitoring Issue of Macroeconomics & Finance

Stabilitas Semu, Fiskal Rapuh

M. Rizal Taufikurahman

Head of Center

Riza Annisa Pujarama

Researcher

Sia Nawir

Researcher

Salsabila Azkia Farhani

Researcher

Zulianissa Diah Kusmawati

Research Assistant

Eko Listiyanto

Director of Big Data Development

Abdul Manap Pulungan

Researcher

M. Syamil Ikliil Abd Barr

Researcher

Noval Fauzan

Research Assistant



Ringkasan Eksekutif

Ketidakpastian kebijakan di Indonesia meningkat sejak 2024 dan terus berlanjut hingga 2026. Sepanjang Januari–Juli 2026, berbagai kebijakan dan peristiwa penting, termasuk perubahan outlook peringkat kredit oleh Moody's dan Fitch dari stabil menjadi negatif, turut meningkatkan persepsi risiko investor terhadap aset domestik. Meskipun status *investment grade* Indonesia tetap terjaga, meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko fiskal menjadikan konsistensi, transparansi, dan kepastian implementasi kebijakan sebagai faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar keuangan.

Dari sisi moneter, tekanan arus keluar modal asing dan pelemahan rupiah mendorong Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75% untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan daya tarik aset domestik. Kebijakan ini meningkatkan yield SBN dan SRBI, sementara tingginya imbal hasil SRBI berhasil menarik kembali aliran modal asing jangka pendek. Namun, ketergantungan pada dana jangka pendek tersebut meningkatkan kerentanan pasar terhadap perubahan sentimen global dan arah kebijakan moneter The Fed.

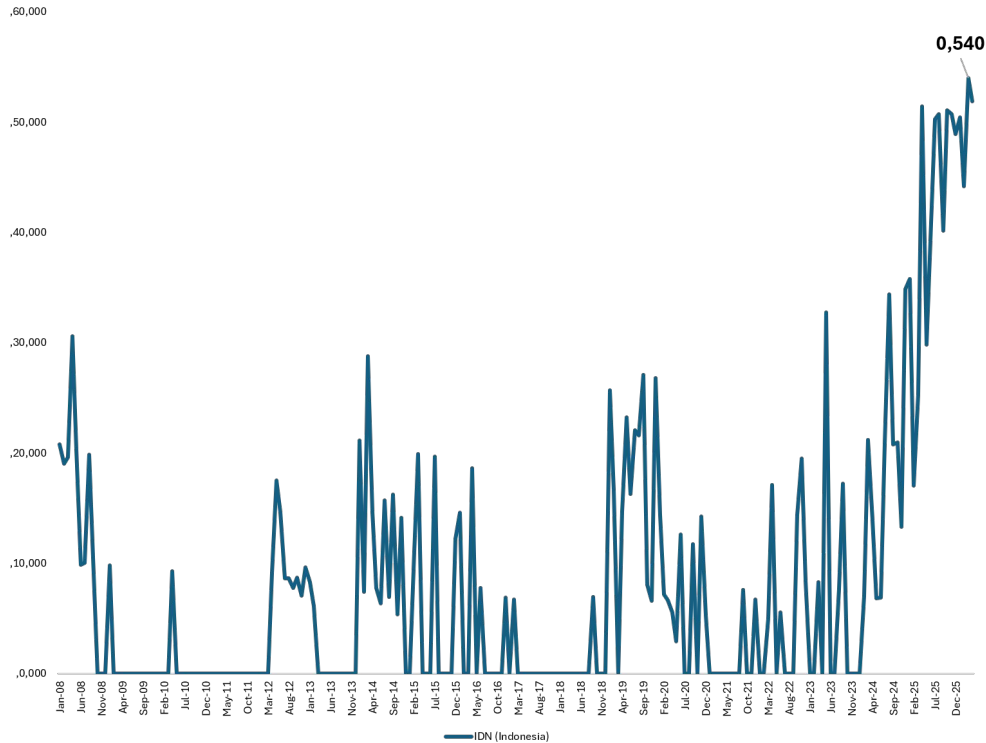
Pada aspek fiskal, penerimaan negara masih bertumpu pada penerimaan perpajakan, sementara *tax ratio* Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 9-10% terhadap PDB. Upaya memperluas basis pajak perlu diimbangi dengan penguatan kepatuhan dan administrasi perpajakan untuk mempersempit *tax gap*. Di sisi lain, meningkatnya belanja pemerintah pusat, melemahnya transfer ke daerah, serta akselerasi pembiayaan utang menunjukkan bahwa ruang fiskal semakin terbatas dan efektivitas belanja negara menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.



***Update* Moneter dan Keuangan**

Ketidakpastian Kebijakan Domestik Melonjak

The World Policy Uncertainty Index for Indonesia Jan 2008 - Apr 2026



- The World Uncertainty Policy Index (WPUI) menunjukkan tingkat ketidakpastian kebijakan di tingkat global. Nilai Uncertainty Policy Index di Indonesia menunjukkan perubahan pola yang berbeda sejak 2024. Pada 2008-2023, tingkat ketidakpastian kebijakan cenderung episodik, ditandai dengan lonjakan sesaat yang kemudian kembali ke level rendah. Namun, memasuki tahun 2024, tingkat ketidakpastian kebijakan di Indonesia secara persisten terus mengalami peningkatan hingga pada Maret 2026 nilainya mencapai 0,540.
- Tingginya indeks ketidakpastian kebijakan ini sejalan dengan berbagai macam kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah secara tiba-tiba. Pemerintah saat ini kerap kali mengumumkan kebijakan secara tiba-tiba sehingga menciptakan tambahan ketidakpastian pada ekonomi domestik.
- Tingginya tingkat ketidakpastian kebijakan ini salah satu dampaknya dapat mempengaruhi sentimen investor asing terhadap portofolio Indonesia.

Sumber: NBER (diolah)

Dinamika Ketidakpastian Kebijakan dan Respons Pasar Keuangan

Peristiwa Kebijakan Domestik dan Pergerakan IHSG (Jan-Jul 2026)

27 Jan	Penilaian transparansi pasar saham domestik oleh MSCI	H+1 ▼ -7,35%
05 Feb	Moody's Rating: Baa2, Outlook Negative	H+1 ▼ -2,08%
04 Mar	Fitch Rating: BBB, Outlook Negative	H ▼ -4,57%
08 Mei	Rencana kenaikan tarif royalti minerba	H ▼ -2,86%
20 Mei	KEM-PPKF & DSI Danantara umumkan kebijakan "Ekspor SDA Satu Pintu"	H+1 ▼ -3,54%
27 Jul	Pengunduran Diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI	H ▼ -0,17%

- Tingginya tingkat ketidakpastian kebijakan bagi pasar merupakan sinyal yang tidak baik, terutama bagi para investor, karena menunjukkan tidak adanya konsistensi yang dapat mempengaruhi pengembalian modal dan profit yang didapat.
- Sepanjang semester I-2026, pasar keuangan Indonesia bukan hanya mendapat penilaian yang kurang baik dari lembaga pemeringkat investasi global seperti MSCI, Moody's dan Fitch, tapi juga mendapat tantangan dari berbagai kebijakan pemerintah yang direspon negatif oleh pasar.
- Pengumuman kebijakan Pemerintah seperti rencana kenaikan tarif royalti minerba, kebijakan ekspor SDA satu pintu, hingga pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, diikuti oleh penurunan IHSG.

Sumber: Berbagai sumber (diolah)

Kerentanan Kepercayaan Investor: Tentang Peringatan Pemeringkatan Global

Indonesia Global Credit Rating

Lembaga	Review Sebelum	Review Sesudah	Perubahan	Concern
S&P	30 Juli 2025 BBB*	13 Juli 2026 BBB*	Stable	Fiskal tetap kuat, pertumbuhan ekonomi stabil, dan efektivitas kebijakan pemerintah
Moody's	16 April 2024 Baa2*	5 Februari 2026 Baa2****	Stable to Negative	Pelemahan pendapatan negara, penyempitan ruang fiskal, dan risiko <i>debt affordability</i>
Fitch	7 Maret 2025 BBB*	4 Maret 2026 BBB****	Stable to Negative	Pelebaran defisit fiskal, lemahnya pelemahan, dan meningkatnya beban utang

NB: *rating affirmation

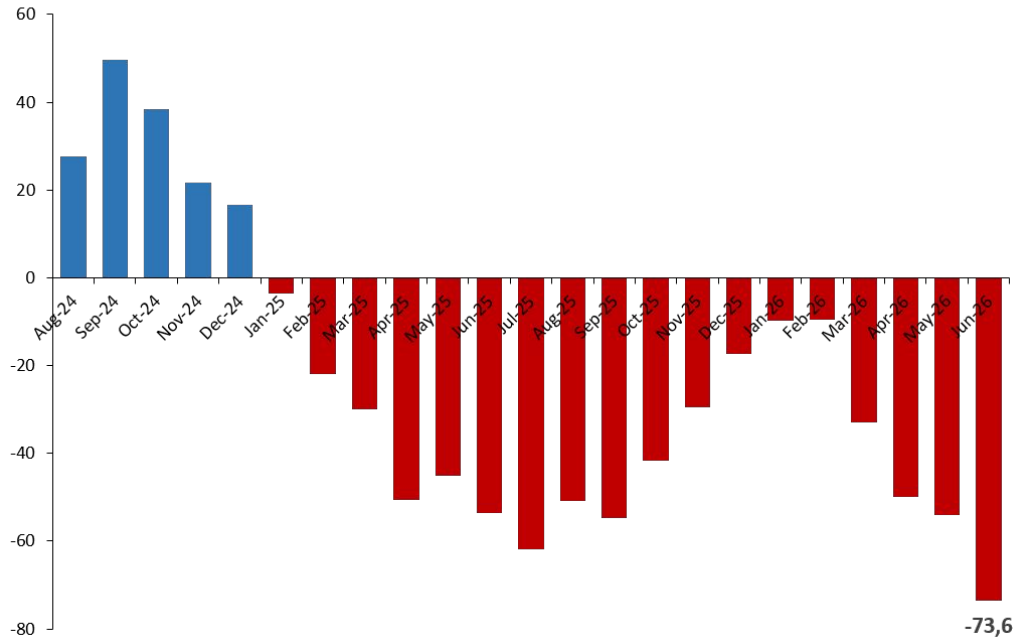
****outlook revised from stable to negative

- Status *investment grade* Indonesia tetap terjaga, tetapi pandangan lembaga pemeringkat terhadap prospek fiskal Indonesia mulai menunjukkan perbedaan. S&P masih menilai fundamental ekonomi cukup kuat, sementara Moody's dan Fitch menyoroti meningkatnya risiko fiskal melalui perubahan *outlook* menjadi *negative*.
- Bagi pasar keuangan, perubahan *outlook* bukan sekedar perubahan penilaian kredit. Perubahan tersebut sering dipandang sebagai sinyal awal (*early warning*) bagi investor terhadap meningkatnya persepsi risiko terhadap aset domestik. Apabila risiko fiskal tidak dikelola dengan baik, tekanan terhadap arus modal dan stabilitas pasar keuangan berpotensi meningkat.

Sumber: BI (diolah)

Capital Outflow Mencerminkan Kehati-hatian Investor Asing

Net Foreign Purchase (Year-to-Date)

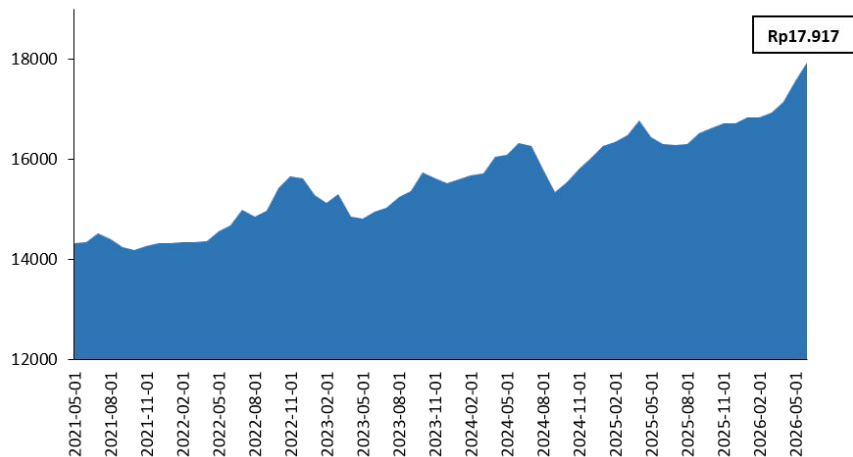


- Meningkatnya persepsi risiko tercermin pada perubahan arus modal asing di pasar saham domestik. Setelah mencatat *net foreign inflow* pada paruh kedua 2024, tren tersebut berbalik menjadi *net foreign sell* sepanjang 2025 hingga 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor asing cenderung melakukan penyesuaian portofolio seiring meningkatnya ketidakpastian global dan kekhawatiran terhadap prospek fiskal domestik.
- Berlanjutnya *capital outflow* menjadi sinyal bahwa sentimen pasar masih belum sepenuhnya pulih. Hingga Juni 2026, *net foreign sell* tercatat mencapai Rp73,6 triliun, yang berpotensi mengurangi likuiditas pasar keuangan domestik serta meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi ini juga mempersempit ruang stabilisasi pasar apabila ketidakpastian terus berlanjut.

Sumber: CEIC (diolah)

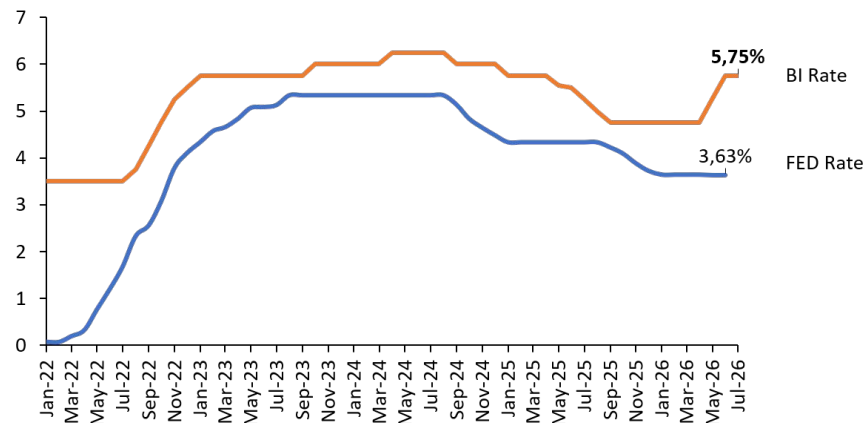
Tekanan Nilai Tukar Menjaga BI Rate Tetap Tinggi

Currency Conversions USD for Indonesia (Average of Daily)



- *Capital outflow* turut meningkatkan permintaan terhadap valuta asing dan memberikan tekanan depresiasi pada nilai tukar rupiah. Hingga Juni 2026, rupiah telah melemah ke kisaran Rp17.917 per dolar AS berdasar rata-rata harian, mencerminkan tingginya sensitivitas pasar domestik terhadap perubahan sentimen global maupun pergeseran arus modal asing.

FED Rate per Mei 2026 dan BI Rate per Juli 2026



Sumber: FERD dan BI (diolah)

- Tekanan terhadap rupiah mendorong Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75% pada Juli 2026 untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan daya tarik aset domestik. Ke depan, ruang pelonggaran moneter diperkirakan masih terbatas. Apabila The Fed kembali menaikkan suku bunga akibat tekanan inflasi atau risiko geopolitik, risiko *capital outflow* berpotensi meningkat sehingga mempersempit ruang BI untuk menurunkan BI Rate.

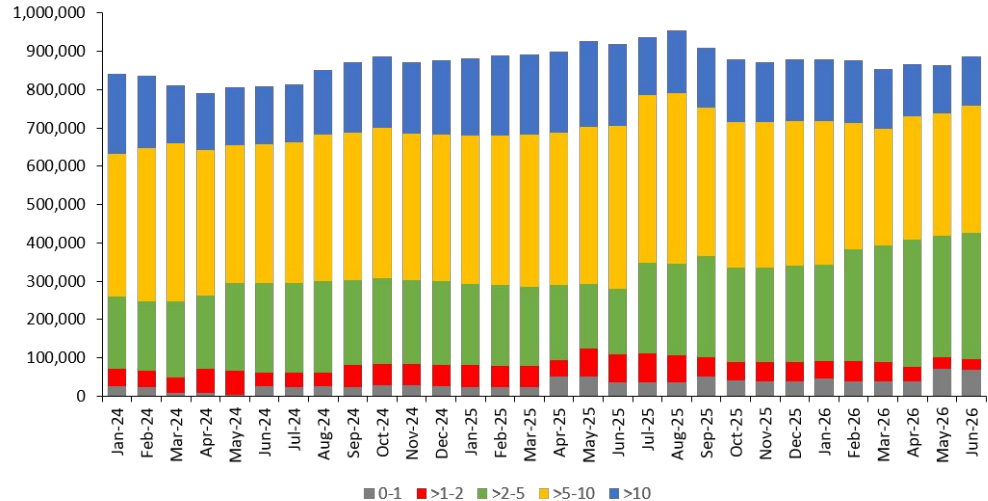
Peningkatan Yield SBN: Resiliensi Semu Investor Asing?

Yield SBN Tenor 1 Tahun, 5 Tahun, dan 10 Tahun



- BI Rate yang tetap tinggi, bersama perkembangan yield global, ekspektasi inflasi, kondisi fiskal, dan perubahan premi risiko, turut memengaruhi pergerakan yield SBN yang berada pada kisaran 7,10%–7,24% pada Juli 2026.

Kepemilikan SBN oleh Investor Non-Residen berdasarkan Sisa Jatuh Tempo

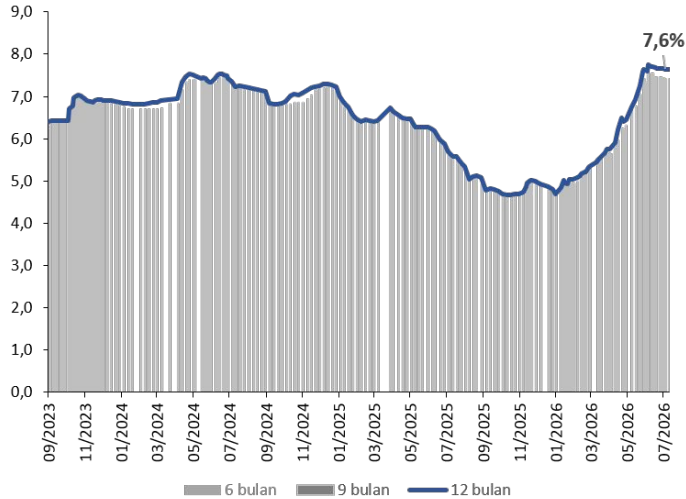


- Peningkatan kepemilikan SBN pada tenor 2–5 tahun dan penurunan pada tenor di atas 10 tahun menunjukkan meningkatnya preferensi investor terhadap tenor yang lebih pendek. Pergeseran ini mengindikasikan kehati-hatian investor dalam menghadapi ketidakpastian pasar serta prospek suku bunga ke depan.

Sumber: CEIC dan DJPPR Kemenkeu (diolah)

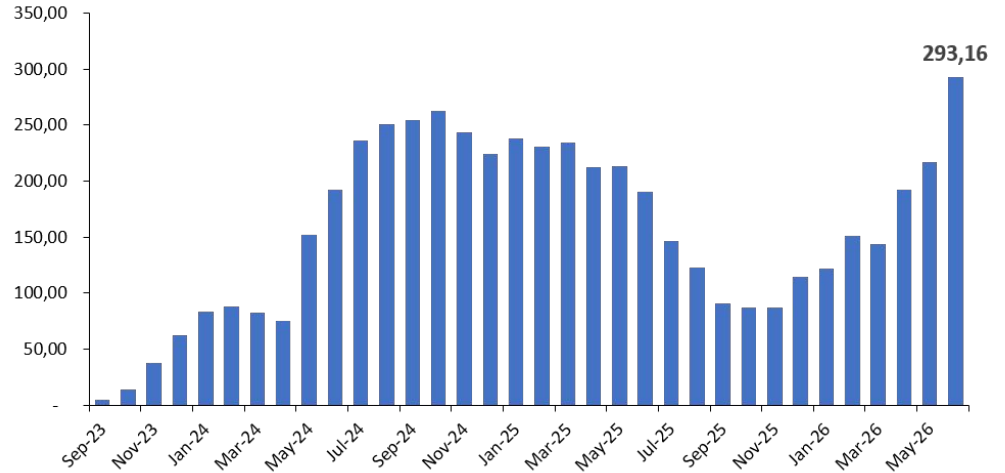
SRBI Memperkuat Daya Tarik Aset Domestik

Yield SRBI Tenor 6 Bulan, 9 Bulan, dan 12 Bulan



- Tingginya BI Rate turut mendorong kenaikan yield SRBI tenor 12 bulan mencapai 7,6% pada Juli 2026. Imbal hasil yang kompetitif menjadikan SRBI semakin menarik sebagai instrumen penempatan dana jangka pendek.

Kepemilikan SRBI Non Residen Sep 2023 - Juni 2026 (Triliun Rupiah)



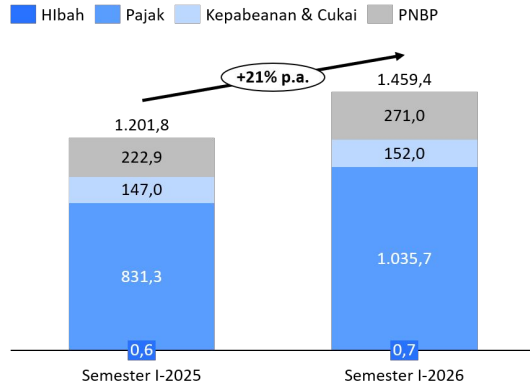
- Meningkatnya kepemilikan non-residen hingga Rp293,16 triliun mengindikasikan bahwa SRBI efektif mendukung stabilisasi pasar keuangan melalui masuknya kembali aliran modal asing. Namun, dominasi dana jangka pendek juga meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan sentimen global dan arah kebijakan moneter The Fed.

Sumber: BI (diolah)

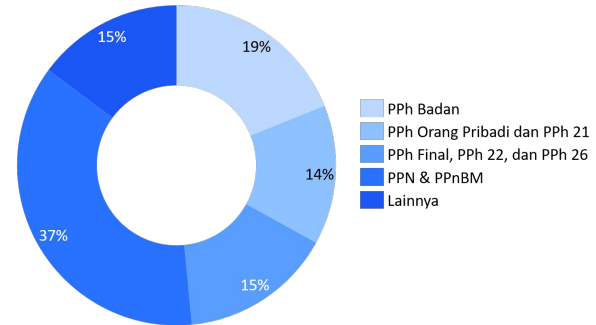
Update Kebijakan Fiskal

Mesin Pendapatan Masih Bergantung pada Satu Pintu

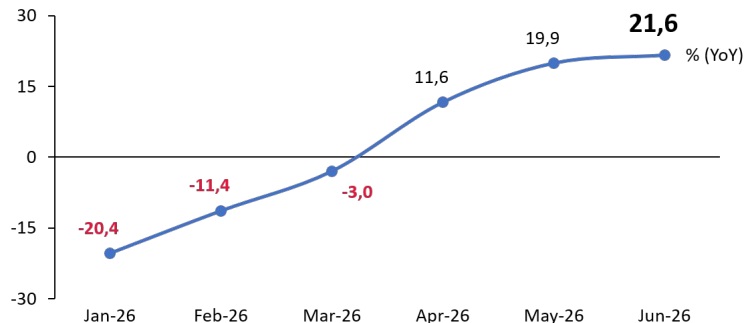
Komponen Pendapatan (Triliun Rupiah)



Anatomi Proporsi Penerimaan Pajak Semester I 2026 (Triliun Rupiah)



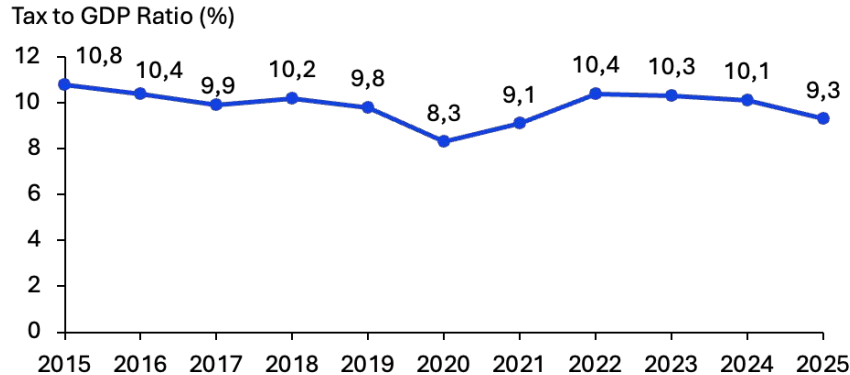
Laju Pertumbuhan PNPB Tersendat di Awal



- Meskipun pendapatan negara tumbuh tumbuh 21,4% pada semester I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun 2025, namun mesin pendapatan masih bertumpu pada penerimaan pajak sebagai kontributor terbesarnya.
- Pada tubuh penerimaan pajak, PPN dan PPh masih menjadi dua pos dengan porsi terbesar, sekaligus paling rentan terhadap tekanan daya beli yang tengah dihadapi masyarakat, khususnya kelas menengah yang kedudukannya kian tergerus dan pada gilirannya berpotensi meresonansi kedua pos penerimaan tersebut ke depannya.
- Di sisi lain, PNPB sempat berkontraksi cukup dalam pada triwulan pertama sebelum berangsur pulih pada triwulan kedua. Pola fluktuatif ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pos PNPB ke depan terkait mampu atau tidaknya mengoptimalkan momentum pemulihan, atau justru kembali tertekan seperti kondisi triwulan pertama, sekaligus menegaskan bahwa hampir seluruh komponen pendapatan negara pada semester ini masih diwarnai fase pemulihan yang belum sepenuhnya stabil.

Tax Gap: Tantangan Reformasi Perpajakan Indonesia

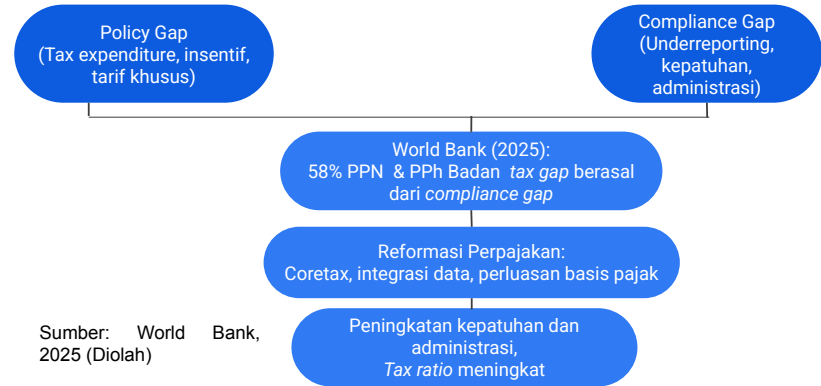
Tax Ratio Indonesia yang Cenderung Stagnan



Sumber: CEIC, 2026

- *Tax ratio* Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 9-10% PDB dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini menunjukkan ruang penerimaan negara yang belum optimal karena masih berada di bawah rata-rata negara pembanding, terutama di kawasan Asia-Pasifik
- Ruang peningkatan penerimaan negara masih terbuka melalui reformasi perpajakan yang tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga meningkatkan efektivitas administrasi dan kepatuhan wajib pajak.

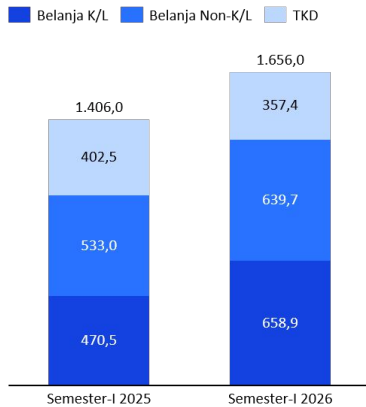
Penyebab Tax Gap dan Respons Reformasi Perpajakan



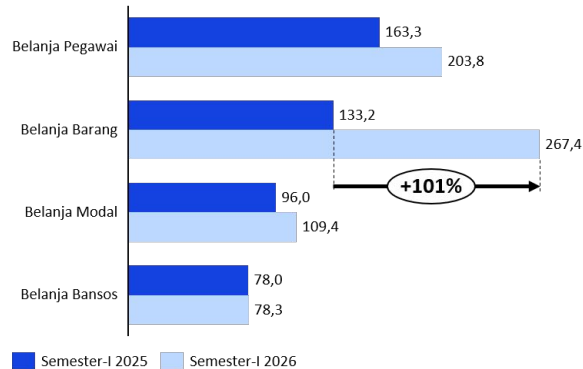
- Temuan World Bank (2025) menunjukkan sekitar 58% *tax gap* PPN dan PPh Badan berasal dari *compliance gap*, sehingga reformasi administrasi dan kepatuhan menjadi faktor yang lebih menentukan dibanding sekadar memperluas objek pajak
- Meskipun sekitar 19,1 juta wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan, hingga 30 April 2026 realisasi pelaporan baru mencapai 13,06 juta SPT (68,5% dari total WP wajib SPT). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan dalam reformasi perpajakan.

Belanja Pusat Melonjak, Transfer ke Daerah Melemah

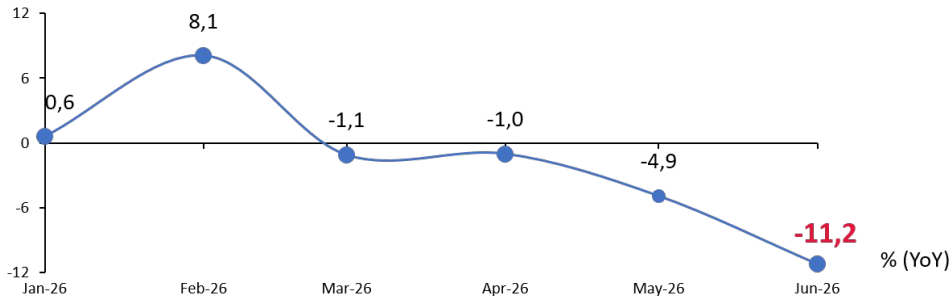
Komponen Realisasi Belanja (Triliun Rupiah)



Alokasi Belanja K/L (Triliun Rupiah)



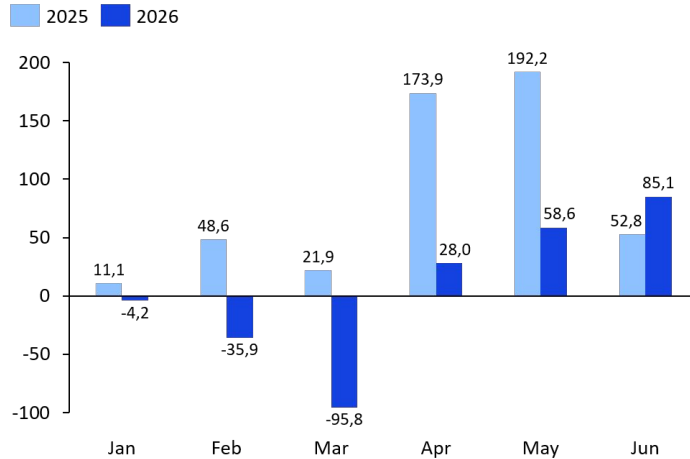
Pertumbuhan Transfer Ke Daerah Merosot Tajam



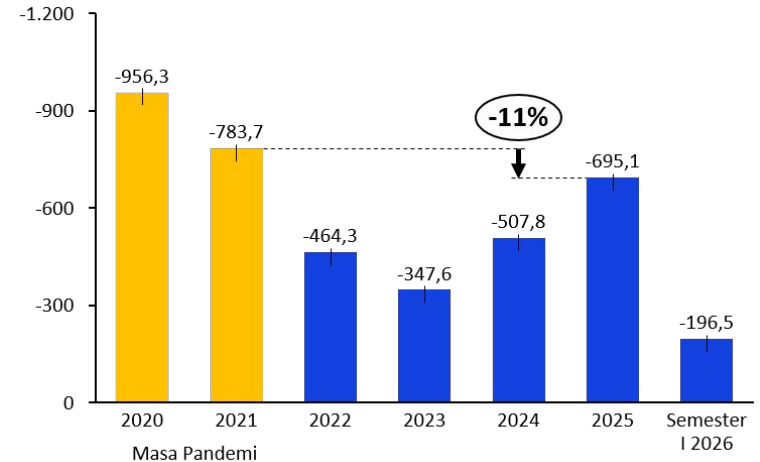
- Pemerintah Pusat terus memperluas ruang belanjanya, tercermin dari lonjakan Belanja K/L yang mencapai 40% dan Belanja Barang yang bahkan naik hingga dua kali lipat.
- Salah satu mesin utama pendorong membengkaknya pos belanja barang berasal dari realisasi anggaran program prioritas seperti MBG yang realisasinya telah mencapai Rp98,8 triliun dan masuk dalam kandungan pos tersebut.
- Sebagai konsekuensinya, Transfer ke Daerah (TKD) terus melandai dan jatuh di level 11,2% pada Juni, sejalan dengan pemangkasan TKD 2026 ke level terendah dalam dua dekade terakhir, sekaligus penghapusan komponen gaji PPPK dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebelumnya turut disokong pusat.
- Dampak nyata dari pemangkasan tersebut salah satunya datang dari kabar tentang setidaknya 78 pemerintah daerah dilaporkan tak sanggup membayar honor guru PPPK paruh waktu.
- Pemangkasan TKD turut mengganggu pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sanitasi, serta menyulitkan daerah memenuhi Standar Pelayanan Minimal di sektor kesehatan dan pendidikan yang menegaskan bahwa tekanan pada TKD menjalar langsung ke kapasitas layanan publik dasar dan mencuat sebagai pertanyaan bagi pemerintah tentang konsistensi komitmen desentralisasi fiskal.

Bayang-bayang Defisit yang Nyaris Setara Masa Pandemi

Keseimbangan Primer (Triliun Rupiah)



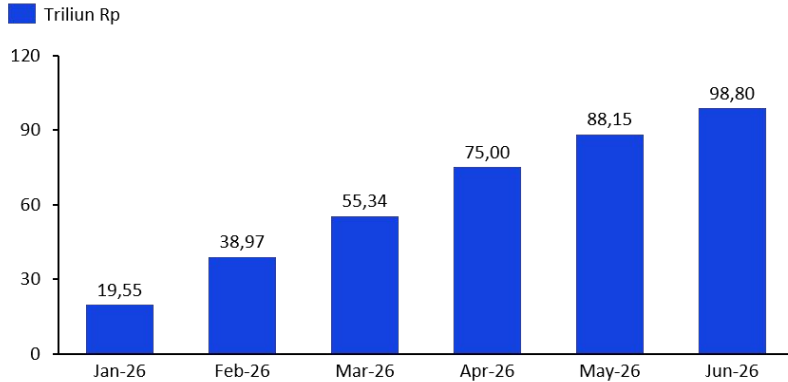
Defisit Anggaran (Triliun Rupiah)



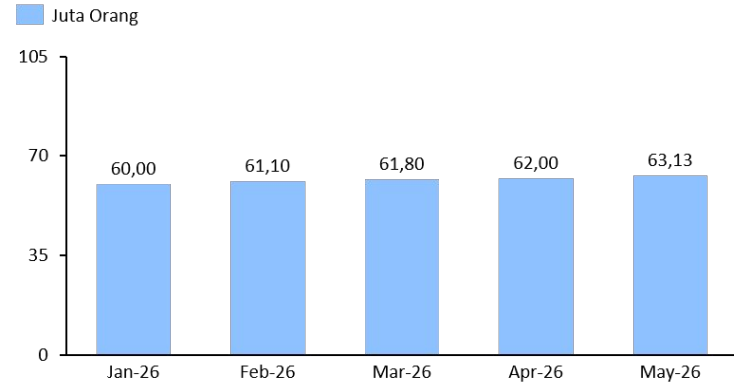
- Keseimbangan primer jatuh ke defisit Rp95,8 triliun pada Maret 2026, sangat kontras jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mencatatkan surplus Rp21,9 triliun. Kondisi ini menandakan belanja negara di luar beban bunga utang telah melampaui pendapatan yang diterima serta mengindikasikan adanya tekanan fiskal yang lebih besar.
- Defisit anggaran 2025 tercatat Rp695,1 triliun, hanya terpaut 11% dari defisit era pandemi pada 2021 (Rp783,7 triliun). Besaran yang mendekati level krisis kesehatan global ini terjadi di tengah kondisi ekonomi tanpa faktor luar biasa (*extraordinary*) yang sebelumnya menjadi justifikasi pelebaran defisit.
- Perbaikan keseimbangan primer pada April–Juni 2026 menjadi Rp28,0 triliun hingga Rp85,1 triliun belum dapat serta-merta dibaca sebagai pemulihan struktural. Perbaikan tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut dengan memperhatikan pola penerimaan dan belanja sepanjang tahun, termasuk kemungkinan adanya perbedaan waktu realisasi antar komponen anggaran.
- Pada sisi pembiayaan, strategi *front-loading* utang sejak awal tahun menunjukkan upaya pemerintah mengamankan kebutuhan pembiayaan lebih dini di tengah tingginya ketidakpastian pasar.

Inkonsistensi Penganggaran Pada Dapur Anggaran MBG

Realisasi Anggaran MBG Januari - Juni 2026



Penerima Manfaat MBG Januari - Mei 2026



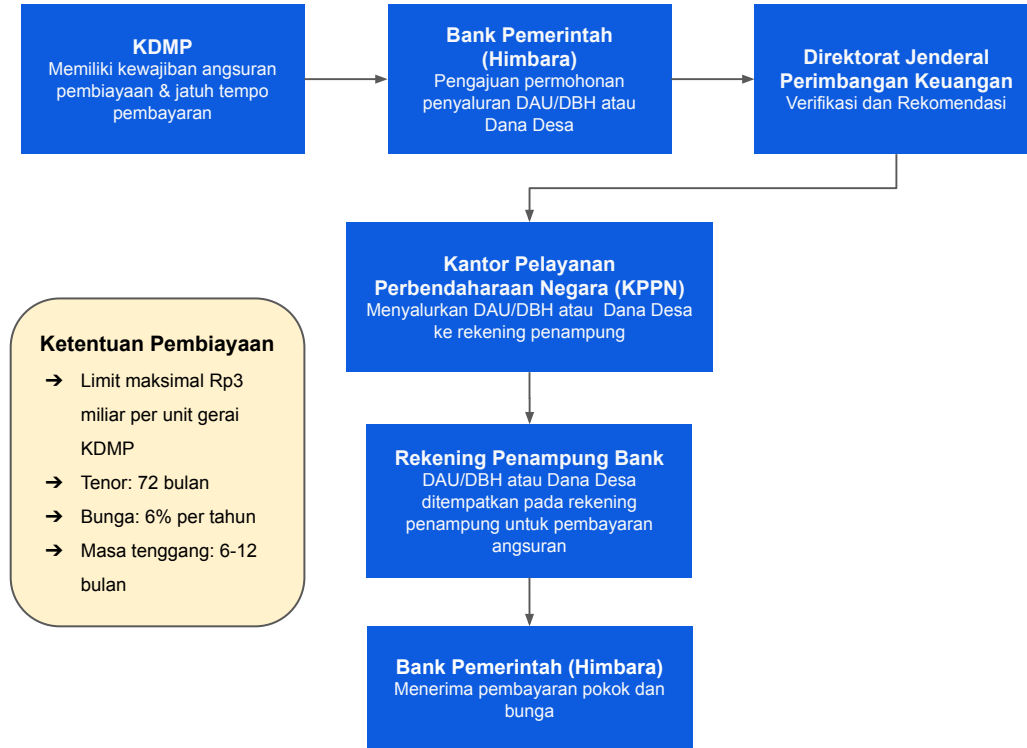
Kronologi Perubahan Anggaran MBG Sepanjang 2026

Timeline	Dasar	Nilai
Pagu Awal	APBN 2026	Rp335 Triliun
Mei 2026	Efisiensi	Rp268 Triliun
Juli 2026	Evaluasi BGN	Rp229 Triliun

- Realisasi anggaran Program MBG melonjak dari Rp19,55 triliun pada Januari menjadi Rp98,8 triliun pada Juni 2026, tumbuh hampir lima kali lipat dalam enam bulan, sementara penerima manfaat hanya bertambah dari 60 juta menjadi 63,13 juta orang hingga Mei. Disparitas laju pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa lonjakan realisasi anggaran tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan perluasan cakupan penerima dan membuka pertanyaan mengenai kemungkinan penyerapan anggaran di luar fungsi pokok penyaluran makanan bergizi yang patut ditelusuri lebih lanjut.
- Nilai pagu anggaran MBG sepanjang 2026 mengalami dua pemangkasan signifikan, dari Rp335 triliun pada penetapan awal APBN 2026, hingga menjadi Rp229 triliun melalui evaluasi BGN pada Juli 2026. Fluktuasi tajam dalam kurun kurang dari setahun ini mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan yang tampak belum didasarkan pada kalkulasi kebutuhan riil di lapangan.

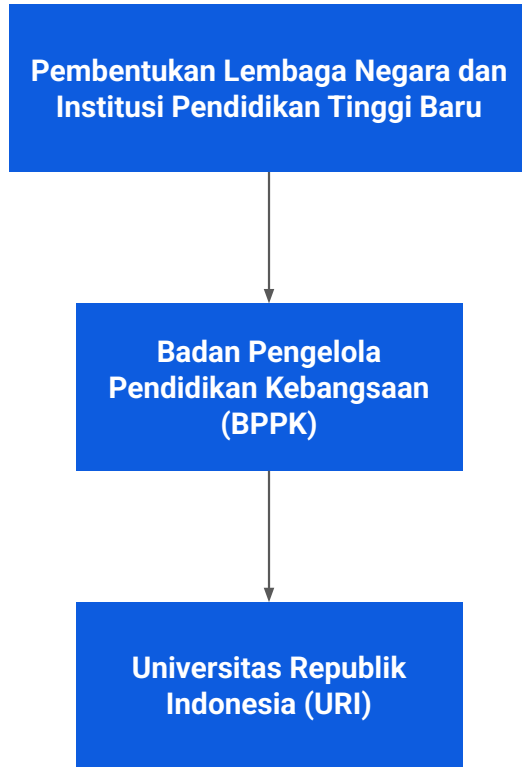
Tantangan Skema Pembayaran Cicilan Koperasi Desa Merah Putih

Skema Pembayaran Angsuran KKMP/KDMP Berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2026



- Dengan skema pembayaran dalam PMK No.15 Tahun 2026, pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan melalui TKD (Dana Desa untuk KDMP atau DAU/DBH untuk KKMP). Hal ini berpotensi mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah maupun desa apabila kapasitas fiskal tidak bertambah.
- Skema cicilan ini dapat menambah kekeringan fiskal daerah, apalagi jika tahun 2027 anggaran ke TKD masih belum berubah dibandingkan 2026. Padahal di satu kabupaten bisa terdiri dari kurang lebih 150 desa, hingga di awal cicilan, Pemerintah Daerah perlu menanggung 150 cicilan KDMP.
- Dampak lanjutannya adalah potensi daerah tidak bisa memenuhi tugas *mandatory*-nya di sektor pendidikan dan tugas utamanya dalam memenuhi standar pelayanan minimum di daerah, akibat skema pembiayaan yang menyerap kapasitas fiskal daerah itu sendiri.

Program Prioritas Baru: Universitas Republik Indonesia



- Pemerintah mengumumkan pendirian Universitas Republik Indonesia yang merupakan program dari lembaga negara baru yaitu Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK).
- Tujuan pendirian Universitas Republik Indonesia adalah untuk mengintegrasikan sistem pembinaan kepemimpinan nasional, mulai dari jenjang sekolah unggulan hingga pendidikan tinggi, serta melatih aparatur dan calon pemimpin strategis.
- Pemerintah berencana membangun 10 kampus URI yang difokuskan pada bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), serta diintegrasikan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Pembentukan lembaga negara dan institusi pendidikan baru ini akan menambah beban anggaran baru pada pos belanja APBN di tengah ketatnya ruang APBN dan defisit anggaran yang cukup tinggi. Selain itu, dengan linimasa pembentukan yang sangat jauh setelah APBN 2026 disahkan, rencana sumber pendanaan dan kebutuhan anggaran yang masih mentah berisiko menyerap anggaran pendidikan yang sudah ada dan berpotensi mengubah struktur anggaran pendidikan, sekaligus menambah beban anggaran setelah MBG kedepannya.

Daftar Pustaka (1/4)

Ahir, H, N Bloom, and D Furceri (2022), “World Uncertainty Index”, NBER Working Paper.

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Pendidikan 2025.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistics-of-education-2025.html>

BBC. (2026). IHSG Sempat Ambruk Beruntun – Apa Pengaruh bagi Indonesia dan Masyarakat? BBC.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg4ed3xl40ro>

BI. (2026a). Indonesia Sovereign Credit Rating - July 2026.

<https://www.bi.go.id/en/iru/economic-market-data/Pages/Indonesia-Sovereign-Rating---July-2026.aspx>

BI. (2026b). Ownership of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI). BI.

<https://www.bi.go.id/en/iru/economic-market-data/srbi/default.aspx>

CEIC. (2026a). Government Bond Yield: PHEI. <https://insights.ceicdata.com/Wawasan-198/views>

CEIC. (2026b). Net Foreign Purchase (Year-to-Date). <https://insights.ceicdata.com/Wawasan-198/views>

CEIC. (2026c). Yield SRBI. CEIC. <https://insights.ceicdata.com/Wawasan-198/views>

CNBC Indonesia. (2026). 78 Pemda Tak Sanggup Bayar Gaji Guru PPPK, Kemendikdasmen Pasang Badan. CNBC Indonesia. [78 Pemda Tak Sanggup Bayar Gaji Guru PPPK, Kemendikdasmen Pasang Badan](#)

DJPPR Kemenkeu. (2026). Kepemilikan SBN Rupiah yg Dapat Diperdagangkan oleh Asing Per Sektor. DJPPR Kemenkeu.

<https://djppr.kemenkeu.go.id/kepemilikansbnrupiahyangdapatdiperdagangkanolehnonresiden>

Daftar Pustaka (2/4)

FERD. (2026a). Currency Conversions: US Dollar Exchange Rate: Average of Daily Rates: National Currency: USD for Indonesia.

<https://fred.stlouisfed.org/series/CCUSMA02IDM618N>

FERD. (2026b). Federal Funds Effective Rate. <https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS>

Ginandjar, I. (2026). IHSG Kembali ke Area Pembukaan 6.185, Gubernur Bank Indonesia Mengundurkan Diri. FXStreet.

<https://www.fxstreet-id.com/news/ihsg-kembali-ke-area-pembukaan-6185-gubernur-bank-indonesia-mengundurkan-diri-202607270424>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). APBN KiTa: Kinerja dan Fakta. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Dampak Coretax mulai terasa, pelaporan SPT tembus 13 juta hingga April 2026*. Media Keuangan.

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/dampak-coretax-mulai-terasa-pelaporan-spt-tembus-13-juta-hingga-april-2026>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (p. 44). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-7-tahun-2026>

Kompas. (2026a). Alasan Koperasi Desa Merah Putih di Sikka Gagal Dibangun, Terkendala Hamparan Batu Besar. Kompas.com.

<https://regional.kompas.com/read/2026/07/22/150949678/alasan-koperasi-desa-merah-putih-di-sikka-gagal-dibangun-terkendala>

Kompas. (2026b). Purbaya Akui Tarik Hampir Separuh Utang APBN di Awal 2026. Kompas.com.

<https://money.kompas.com/read/2026/06/10/114200826/purbaya-akui-tarik-hampir-separuh-utang-apbn-di-awal-2026>

Kompas. (2026c). Sepiring Gizi dan Kelas yang Roboh. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/sepiring-gizi-dan-kelas-yang-roboh>

Liputan 6. (2026). Pembangunan Sekolah Rakyat Tuban Molor, Siswa Kena Imbas. Liputan6.com.

<https://www.liputan6.com/regional/read/8256235/pembangunan-sekolah-rakyat-tuban-molor-siswa-kena-imbis>

Daftar Pustaka (3/4)

Nurmansyah, D. (2026). Pemerintah Siapkan Kenaikan Tarif Royalti Minerba Mulai Juni 2026. Ortax.

<https://ortax.org/pemerintah-siapkan-kenaikan-tarif-royalti-minerba-mulai-juni-2026>

Pemerintah Republik Indonesia (2025). Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Perhapi. (2026). Untung–Buntung RI Ekspor Batu Bara dkk Satu Pintu via Danantara. Perhapi.

<https://perhapi.or.id/untung-buntung-ri-ekspor-batu-bara-dkk-satu-pintu-via-danantara/>

Tempo. (2026a). BGN Pangkas Anggaran MBG Menjadi Rp 229 Triliun. Tempo.co.

<https://www.tempo.co/politik/bgn-pangkas-anggaran-mbg-menjadi-rp-229-triliun-2277364>

Tempo. (2026b). Menteri PU: 93 Sekolah Rakyat dalam Tahap Penyelesaian. Tempo.co.

<https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-pu-93-sekolah-rakyat-dalam-tahap-penyelesaian-2278326>

Wells, L., Yang, W., Nate, S., & Lacoviello, M. (2026). Geopolitical Risk by Country (Jul 25-Present). MatteoIacoviello.Com.

https://www.matteoiacoviello.com/gpr_country.htm

Daftar Pustaka (4/4)

Widyatama, E. (2026). Beda Pandangan S&P, Fitch & Moody's Soal RI, Siapa Layak Dipercaya? CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20260714102537-128-750613/beda-pandangan-sp-fitch-moodys-soal-ri-siapa-layak-dipercaya>

World Bank. (2025). Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia. World Bank.

<https://documents.worldbank.org/curated/en/099030225225027356>

WUI. (2026). World Uncertainty Index (WUI): Global. <https://worlduncertaintyindex.com/>

The logo for INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) is displayed in a large, blue, italicized serif font.

Tentang Center MACFIN-INDEF

Center of Macroeconomics and Finance (MacFin) merupakan pusat kajian di bawah **Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)** yang berfokus pada analisis isu-isu makroekonomi dan keuangan publik Indonesia.

Melalui publikasi riset, *policy brief*, diskusi publik, dan advokasi kebijakan, MacFin berkontribusi dalam memperkaya perdebatan kebijakan ekonomi nasional serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, media, dan masyarakat sipil.

Terima Kasih

Center of Macroeconomics and Finance
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)